#### **BAB IV**

#### ANALISA DATA

# A. Analisis Peran Komite Sekolah dalam Partisipasi Standar Pengelolaan SMA Islam Kartika Surabaya

Temuan peneliti dilapangan disinyalir peran komite sekolah tidak begitu mengambil peran dalam pengelolaan standar sekolah. Hal ini terbukti dari beberapa temuan dilapang berkenaan dengan peran komite sekolah yang cenderung pasif dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berkenaan dengan berbagai pengelolaan yang ada, peran komite sekolah seolah tidak mampu menjalankan peran dan fungsi dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan analisa sebagai berikut:

# 1. Pengelolaan Kurikulum

Dalam pengelolaan kurikulum hendaknya komite sekolah mengambil peran dalam rencana pembelajaran. Komite sekolah juga harus ikut serta dalam pengelolaan yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Akan tetapi temuan dilapangan mengatakan bahwa komite sekolah sifatnya hanya berkoordinasi. Baik berkenaan dengan hal yang sifatnya dari luar maupun dari dalam.

Peran komite sekolah bersifat umum dan tidak spesifik. Dari temuan ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan kurikulum peran serta

komite sekolah masih minim. Berbagai persoalan berkaitan dengan rencana dan strategi hanya dikoordinasikan. Komite sekolah seolah menempatkan diri sebagai informan, bukan pihak yang seharusnya ikut andil dalam mewujudkan tujuan dari kurkulum itu sendiri.

# 2. Pengelolaan Keuangan

Dalam hal pengelolaan keuangan sekolah peran serta komite sekolah nampak berjalan efektif. Hal ini senada dengan dengan temuan di lapangan yang menyebutkan bahwa Komite Sekolah bekerja sama dengan pihak Yayasan pengampu sekolah dan pihak sekolah bersama-sama merencanakan kebutuhan dana operasional sekolah yang terkumpul dalam rencana strategi (Renstra) sekolah berjangka, mengawasi jalannya implementasi perencanaan sekaligus turut berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar yang dapat membantu dalam segi pendanaan (donatur), mengikuti proses pelaporan akhir keadaan keuangan sekolah berupa keterangan pemasukan, pengeluaran, dan hasil akhirnya.

Akan tetapi ada sedikit hal yang berbeda dengan kondisi keuangan sekolah pada umumnya. Sekolah Menengah Atas Islam Kartika memiliki donator tetap dari pihak selain pemerintah, yakni pihak swasta Baitul Mal Hidayatullah.

Menanggapi hal demikian, sudah sepatutnya SMA Islam Kartika membuat rencana pembelajaran yang memadai. Sarana dan prasarana tentunya

lebih menunjang dalam proses pembelajaran. Namun hasil wawancara ini kontradiktif dengan kondisi dilapangan yang minim fasilitas.

## 3. Pengelolaan Ketenagaan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhusannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang maksudkan disini adalah seorang guru atau tenaga pendidik harus bersifat professional sesuai dengan bidangnya. Tenaga pendidik harusnya diseleksi sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Komite sekolah dalam hal ini harus bersikap aktif untuk membantu pihak sekolah dalam menemukan tenaga pendidik yang professional.

Melalui rapat-rapat yang diagendakan untuk mencapai standar pengelolaan pendidikan pihak komite sekolah dituntut aktif untuk memberikan masukan terkait kriteria tenaga pendidik yang mampu menunjang tujuan pendidikan. Akan tetapi di lapangan, komite sekolah justru tidak mengambil banyak peran dalam mewujudkan pencapaian standar pengelolaan pendidikan.

Pada SMA Islam Kartika sampai detik ini belum memiliki kriteria khusus dalam menjaring tenaga pendidik yang menunjang system pembelajaran. Seleksi tenaga pendidik bersifat subjektif dan di ambil dari kolega, pertemanan maupun alumni dari sekolah tersebut.

Sedangkan upaya peningkatan mutu tenaga pendidik hanya mengandalkan dari pendelegasian dan pengiriman tenaga pendidik mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Melihat hal yang demikian, komite sekolah SMA Islam Kartika Surabaya terkesan menutup mata.

# 4. Pengelolaan Kesiswaan

Berkenaan dengan peran komite sekolah dalam bidang pengelolaan kesiswaan hampir tidak nampak sama sekali. Bagaimana mungkin menanggapi persaingan dengan sekolah lain pihak sekolah justru mengaambil langkah dengan memberikan beasiswa bukan meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Disini seharusnya komite sekolah memberikan masukan dalam peningkatan kualitas sekolah dengan cara memperhatikan cara belajar siswa, bukan memberikan bea siswa.

Dengan begitu pihak sekolah secara tidak langsung sudah mengabaikan kualitas siswa dan terkesan mengedepankan kuantitas siswa. Persoalan semacam ini tidak mendapat respon dari pihak komite sekolah.

#### 5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Peran serta komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana bekerjasama dengan pihak yayasan. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana tidak bisa serta merta dikelola oleh komite sekolah dan pihak sekolah. Mengingat dalam satu atap terdapat beberapa institusi dalam nanungan yayasan, maka komite sekolah dan pihak sekolah tidak sepenuhnya mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan

belajar siswa. Termasuk diantaranya penjadwalan jam masuk sekolah kelas siang karena bergantian ruang kelas dengan satuan pendidikan menengah pertama yang lebih dulu di jam pagi.

#### 6. Pengelolaan Potensi Masyarakat Sekitar

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian semua bentuk dukungan masyarakat termasuk dukungan orang tua siswa adalah wujud kerjasama. Begitu juga semua kegiatan disekolah, termasuk proses belajar mengajar yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, adalah wujud kerjasama yang perlu ditingkatkan.

## 7. Pengelolaan Administrasi Sekolah

Komite sekolah SMA Islam Kartika Surabaya memiliki peran dalam pengelolaan administrasi sekolah. Ada point positif dalam hal laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Komite sekolah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah sangat membantu dalam kelengkapan administrasi sekolah.

#### 8. Pengelolaan Laboratorium dan Perpustakaan

Laboratorium dan perpustakaan merupakan bagian dari sarana sekolah yang keduanya dikelola bersama oleh pihak komite sekolah, yayasan, dan pihak sekolah. Pengelolaan ini selalu dilakukan bersama, sehingga tidak ada alas an bagi komite sekolah untuk tidak ikut serta dalam pengelolaan laboratorium ini. Tetapi dalam pengelolaan perpustakaan pihak sekolah lebih banyak mengambil peran dari yayasan dan komite sekolah.

# 9. Pengelolaan Hasil Penelitian dan Pengelolaan Manajemen Keterampilan

Ini merupakan bagian dari sarana dan prasana penunjang pembelajaran siswa. Pengelolaan serta perencanaan dilakukan oleh pihak terkait, yakni komite sekolah, yayasan, dan pihak sekolah. Berkenaan dengan hal ini, komite sekolah tidak bisa serta merta meninggalkan tugas dan fungsinya. Sehingga bisa dibilang sedikit lebih aktif dalam pengelolaan ini.

# B. Analisis Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Komite Sekolah dalam Partisipasi Pengelolaan SMA Islam Kartika Surabaya

Memahami pemaparan factor pendukung yang disampaikan oleh pihak komite sekolah dan pihak sekolah itu sendiri dapat disimpulkan bahwa pihak komite sekolah tidak bisa memaksimalkan factor pendukung yang ada.

Besarnya dukungan dari para wali murid tidak dapat dimaksimalkan oleh komite sekolah. Seharusnya komite sekolah mampu memanfaatkan kondisi seperti ini. Akan tetapi kenyataan di lapangan pihak sekolah pada sibuk dengan kesibukannya sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya komite sekolah tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Meskipun pada dasarnya komite sekolah di dominasi oleh tokoh masyarakat akan tetapi kesibukan masing-masing menjadi penghambat dalam menjalankan roda kepengurusan komite sekolah. Sehingga tidak sedikit komite sekolah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Disisi lain ada factor pendukung sangat memiliki nilai positif, yakni dalam tubuh komite sekolah terdapat orang-orang yang berpendidikan. Sayangnya mereka tidak dibekali dengan pengetahuan tentang komite sekolah. Hal ini mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir pengurus Komite Sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.